



Gandeng Camat KPU Yogya

● Untuk Sosialisasikan Daftar Pemilih Sementara Pilpres

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, menggandeng camat di 14 Kecamatan untuk mensosialisasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Presiden (Pilpres). Langkah tersebut sebagai upaya agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat terjamin.

"Para camat ini kami minta bantuannya untuk bisa memanfaatkan pertemuan tingkat RT (Rukun Tetangga). Karena mereka lebih dekat dengan masyarakat," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budi-anto, Selasa (13/5).

Ia mengatakan, saat ini proses pemutakhiran data masih terus dilakukan hingga batas akhir 17 Mei mendatang. Selanjutnya KPU akan meminta tanggapan masyarakat mulai 20-26 Mei. DPS tersebut akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres pada 7-9 Juni.

"Harapannya masyarakat bisa aktif melihatnya, apakah dia sudah terdaftar atau belum. Sebab saat-saat itu adalah masa krusial dalam penentuan jumlah daftar pemilih Pilpres," katanya.

Ia menyebutkan, dari jumlah total DPS sebanyak 304.437 pemilih, sejauh ini sudah tercatat menjadi 307.128 pemilih setelah adanya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Namun jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah, karena pemutakhiran untuk pemilih mahasiswa di Yogyakarta

"Para camat ini kami minta bantuannya untuk bisa memanfaatkan pertemuan tingkat RT (Rukun Tetangga). Karena mereka lebih dekat dengan masyarakat"

WAWAN BUDIANTO

Ketua KPU Yogyakarta

nia Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih). Oleh sebab itu KPU harus mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat. Upaya yang dilakukan seperti menggelar forum dengan tokoh masyarakat maupun kelompok mahasiswa luar daerah.

Selain itu, KPU juga membuka pendaftaran di lingkungan kampus. "Kami akan coba adakan layanan keliling ke kampus-kampus, jadi kami jemput bola," kata Wawan.

Menurutnya, dalam pengalaman Pileg lalu, ditemukan kesulitan berupa *upload* data pemilih luar daerah. Sebab, yang bersangkutan belum mencoret DPT di daerah asal. Adanya pemutakhiran data bagi mahasiswa dengan membuat surat pernyataan untuk memilih di Yogyakarta akan dapat mempermudah hal tersebut.

"Kalau mereka sudah masuk dalam DPT di Yogyakarta untuk distribusi logistiknya lebih mudah," katanya.

Wawan mengungkapkan, pelaksanaan Pilpres dari segi kuantitas memana-

tetapi, dari aspek politik dan hukum justru lebih berat. Ia mencontohkan pada 2009 lalu banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami tidak akan berpangku tangan. Dalam Pilpres pemilih juga ada kemungkinan menggugat. Maka agar lebih akurat, semua penduduk yang punya hak pilih harus dimasukkan," katanya.

Harus Terdaftar
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta, Agus Triyatno mengatakan, catatan yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran data adalah setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun harus terdaftar.

Mereka, baik cacat mental, cacat fisik, lanjut usia, gelandangan yang tidak mempunyai KTP atau identitas termasuk pasien yang berada di rumah sakit harus diakomodir hak pilihnya.

Selain itu, dalam *regrouping* Tempat Pemungutan Suara (TPS) harusnya juga memperhatikan tempat tinggal pemilih. Ia mencontohkan di TPS 15 Mantrijeron terdapat dua pemilih terdata di TPS cukup jauh dari tetangga satu Rukun Warga.

"Masa satu kampung hanya dua orang yang geser ke TPS yang jauh, kan kasihan. Harusnya juga memperhatikan hal-hal seperti itu," ungkap Agus.

Seperti diketahui, jumlah TPS di Kota Yogyakarta pada Pileg lalu sebanyak 953 TPS. Dalam Pilpres jumlah TPS menjadi 795. Jika dalam Pileg setiap TPS maksimal memana-

- KPU Kota Jk
- Panwaslu Kota J

✓ Netral
✓ Biasa

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

.....
Kepala

.....
Tid

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 01 Juni 2016
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005